

**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (P3M)**

Jln. Timoho 317, Yogyakarta 55225, Telepon (0274) 561971, Fax (0274) 515989, Email p3m@apmd.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 038/P3M/A/II/2023

Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) STPMD "APMD" Yogyakarta, memberikan Tugas kepada:

I. Ketua Peneliti

Nama : Rini Dorojati, M.S.
NIDK/NIP : 0021115901/ 195911211987022001
Program Studi : Pembangunan Masyarakat Desa –D3

II. Anggota Peneliti 1

Nama : Ir. Christine Sri Widiputranti, M.P.
NIDK/NIY : 0511075802/ 170230 089
Program Studi : Pembangunan Masyarakat Desa –D3

III. Anggota Peneliti 2

Nama : Hery Purnomo, S.Sos., M.P.A.
NIDK/NIY : 0510018801/ 170230 258
Program Studi : Pembangunan Masyarakat Desa - D3

IV. Asisten Peneliti 1 (Mahasiswa)

Nama : Lukman Tofig
NIM : 22330003
Program Studi : Pembangunan Masyarakat Desa – D3

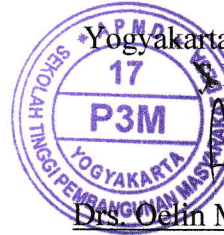
V. Asisten Peneliti 2 (Mahasiswa)

Nama : Theresia Prita Setyawati
NIM : 22330002
Program Studi : Pembangunan Masyarakat Desa – D3

untuk melaksanakan tugas Penelitian STPMD "APMD" Tahun Anggaran 2022/2023 dengan judul:
DAMPAK TATAKELOLA DESA WISATA NGLANGGERAN TERHADAP PELAKU UMKM DI
KALURAHAN NGLANGGERAN PATUK GUNUNGKIDUL

Nomor: 038/P3M/A/II/2023

Demikian surat tugas ini diberikan, kepada yang bersangkutan agar dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan setelah menjalankan tugas, wajib menyerahkan Laporan Akhir Penelitian ke P3M.



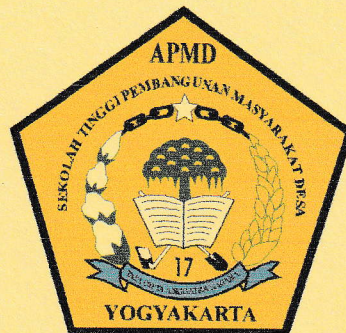
Yogyakarta, 8 Februari 2023

Kepala

Drs. Oelin Marliyantoro, M.Si

NIY. 170 230 162

LAPORAN AKHIR



**DAMPAK TATAKELOLA DESA WISATA NGLANGGERAN TERHADAP PELAKU
UMKM DI KALURAHAN NGLANGGERAN PATUK GUNUNGKIDUL**

Diusulkan oleh:

Ketua Tim Pengusul

Nama : Ir. Rini Dorojati, M.S

NIDN : 0021115901

Anggota Tim Pengusul

1. Nama : Ir.Christine Sri Widiputranti,M.P. :

NIDN : 0511075802

2. Nama : Hery Purnomo S.Sos.,M.PA

NIY : 170.230.258

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"

YOGYAKARTA

2023

HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN BERBASIS MINAT

Judul Penelitian : Dampak Tatakelola Desa Wisata
Nglanggeran Terhadap Pelaku UMKM
Di Kalurahan Nglanggeran Patuk
Gunungkidul

Ketua Tim Peneliti

a. Nama : Ir.Rini Dorojati, M.S.
b. NIDN : 0021115901
c. Jabatan/Golongan : Lektor/III d
d. Jurusan/Fakultas : Program Studi Pembangunan
Masyarakat Desa

e. Perguruan Tinggi : STPMD "APMD" Yogyakarta
f. Bidang Keahlian : Pembangunan masyarakat Desa
g. Alamat Kantor/Telpon/Faks/surel : Jl.Timoho 317 Yogyakarta,
Telp. (0274) 561971
/rinidorojati21@gmail.com

Anggota Peneliti (1)

a. Nama : Ir. Christine Sri Widiputranti, M.P.
b. NIDN : 0511075802
c. Perguruan Tinggi : STPMD "APMD"

Anggota Peneliti (2)

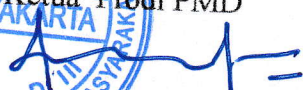
a. Nama : Hery Purnomo S.Sos., M.PA
b. NIDN : 0030115501
c. Perguruan Tinggi : STPMD "APMD"

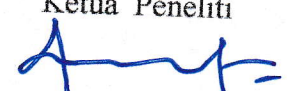
Biaya Penelitian

: Rp 8.000.000,- (Delapan juta rupiah)

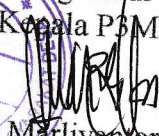
Mengetahui,
Ketua Prodi PMD'

Yogyakarta, 14-Agustus- 2023
Ketua Peneliti


Ir. Rini Dorojati, M.S.
NIDN: 0021115901


Ir. Rini Dorojati, M.S.
NIDN: 002111590

Mengetahui
Kepala P3M


Drs. Oelin Marlilyantoro, M.Si
NIDN: 0528056202

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Identitas Penelitian	iii
Daftar Isi	iv
A. Ringkasan	1
B. HASIL PENELITIAN.....	2
1. Kondisi Geografis.....	2
2. Penduduk.....	2
3. Sarana Prasarana	5
4. Kelembagaan	5
5. Kondisi Sosial Masyarakat	5
6. Destinasi Wisata.....	5
7. Tatakelola Desa Wisata Nglanggeran.....	6
8. UMKM Nglanggeran.....	12
9. Dampak Tatakelola Desa Wisata	12
C. STATUS LUARAN.....	21
D. RENCANA TINDAK LANJUT.....	22
E. DAFTAR PUSTAKA.....	23



SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (P3M)

Sekretariat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, ☎ (0274) 561971, Fax (0274) 515989, email: p3m@apmd.ac.id

SURAT KETERANGAN
Nomor: 074/P3M/A/VIII/2023

Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M), menerangkan bahwa:

NO.	NAMA	NIY	NIDN	PROGRAM STUDI
1.	Ir. Rini Dorojati, M.S	-	0021115901	Pembangunan Masyarakat Desa Program Diploma 3
2.	Ir.Christine Sri Widi Putranti,M.P.	-	-	Pembangunan Masyarakat Desa Program Diploma 3
3.	Hery Purnomo S.Sos.,M.PA	170 230 258	0510018801	Pembangunan Masyarakat Desa Program Diploma 3
4.	Lukman Tofig	-	-	Pembangunan Masyarakat Desa Program Diploma 3
5.	Theresia Prita Setyawati	-	-	Pembangunan Masyarakat Desa Program Diploma 3

Telah melaksanakan tugas Penelitian Tahun Anggaran 2022/2023 dengan judul: "DAMPAK TATAKELOLA DESA WISATA NGLANGGERAN TERHADAP PELAKU UMKM DI KALURAHAN NGLANGGERAN PATUK GUNUNGGKIDUL"

Demikian surat keterangan ini diberikan, kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 10 Agustus 2023
Kepala

Drs. A.Y. Oelin Marliyantoro, M.Si
NIY. 170 230 162



LAPORAN AKHIR



DAMPAK TATAKELOLA DESA WISATA NGLANGGERAN TERHADAP PELAKU UMKM DI KALURAHAN NGLANGGERAN PATUK GUNUNGKIDUL

Diusulkan oleh:

Ketua Tim Pengusul

Nama : Ir. Rini Dorojati, M.S

NIDN : 0021115901

Anggota Tim Pengusul

1. Nama : Ir.Christine Sri Widi Putranti,M.P.

NIDN : 0511075802

2. Nama : Hery Purnomo S.Sos.,M.PA

NIY : 170.230.258

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA

2023

HALAMAN PENGESAHAN

PENELITIAN IPTEKS

Judul Penelitian : Dampak Tatakelola Desa Wisata Nglanggeran Terhadap Pelaku UMKM Di Kalurahan Nglanggeran Patuk Gunungkidul

Ketua Tim Peneliti

- a. Nama : Ir.Rini Dorojati, M.S.
- b. NIDN : 0021115901
- c. Jabatan/Golongan : Lektor/IIId
- d. Jurusan/Fakultas : Program Studi Pembangunan Masyarakat Desa
- e. Perguruan Tinggi : STPMD “APMD” Yogyakarta
- f. Bidang Keahlian : Pembangunan masyarakat Desa
- g. Alamat Kantor/Telpon/Faks/surel : Jl.Timoho 317 Yogyakarta, Telp. (0274) 561971/rinidorojati21@gmail.com

Anggota Peneliti (1)

- a. Nama : Ir. Christine Sri Widiputranti,M.P.
- b. NIDN : 0511075802
- c. Perguruan Tinggi : STPMD “APMD”

Anggota Peneliti (2)

- a. Nama : Hery Purnomo S.Sos.,M.PA
- b. NIDN : 0030115501
- d. Perguruan Tinggi : STPMD “APMD”

Biaya Penelitian : Rp 8.000.000,-(Delapan juta rupiah)

Mengetahui,
Ketua Prodi PMD’

Yogyakarta,9-Agustus- 2023
Ketua Peneliti

Ir.Rini Dorojati,M.S.
NIDN: 0021115901

Ir.Rini Dorojati, M.S.
NIDN: 0021115901

Mengetahui
Kepala P3M

Drs. Oelin Marliyantoro, M.Si
NIDN: 0528056202

LAPORAN KEMAJUAN PENELITIAN

1. IDENTITAS PENELITIAN

Judul Penelitian	:	Dampak Tatakelola Desa Wisata Terhadap UMKM di Kalurahan Patuk Gunungkidul DIY
Skema Penelitian	:	Berbasis Minat
Program Studi	:	Pembangunan Masyarakat Desa
Ketua Peneliti	:	Ir. Rini Dorojati, M.S.
Anggota Peneliti	:	2 orang

2. IDENTITAS PENGUSUL

Nama, Peran	NIDN & Jabfung	Program Studi/ Bagian	Bidang Tugas	ID Sinta	H-Index
Ir.Rini Dorojati,M.S.	0021115901	PMD	Koordinator	6655806	2
Ir. Christine Sri Widiputranti,M.P	0511075802	PMD	sekretaris	6664637	3
Hery Purnomo S.Sos.,M.PA	003011550	PMD	Kordinator asisten lapangan	674270	1

3. LUARAN DAN TARGET CAPAIAN

Luaran Wajib

Tahun Luaran	Jenis Luaran	Status Target Capaian (<i>accepted, published, terdaftar atau granted, atau status lainnya</i>)	Keterangan (url dan nama jurnal, penerbit, url paten, keterangan sejenis lainnya)
1	Jurnal	Proses penulisan	Sosio Reflektif, UIN Suka

Luaran Tambahan

Tahun Luaran	Jenis Luaran	Status Target Capaian (<i>accepted, published, terdaftar atau granted, atau status lainnya</i>)	Keterangan (url dan nama jurnal, penerbit, url paten, keterangan sejenis lainnya)
1			

4.LAPORAN PENELITIAN

A.RINGKASAN

Desa Wisata Nglanggeran wilayah Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul memiliki obyek wisata alam geologi berupa gunung api purba dengan batu berukuran besar. Potensi wisata tersebut dikelola oleh Pokdarwis Nglanggeran bekerjasama dengan Bumdes sejak tahun 2017. Beberapa inovasi usaha yang mendukung wisata geologi tersebut dikembangkan diantaranya berupa embung, spa herbal, transportasi lokasi, homestay, olahan coklat. Berbagai usaha tersebut didukung oleh masyarakat setempat yang termasuk pelaku ekonomi UMKM. Penelitian ini menyoroti dampak tatakelola terhadap pelaku UMKM. Metode penelitian kualitatif eksplanatori digunakan untuk mengungkap fakta dalam tatakelola desa wisata yang dilaksanakan oleh Pokdarwis dengan Bumdes. Bagaimana dampak tatakelola desa wisata yang diterapkan melalui Kerjasama pokdarwis, dengan Bumdes terhadap pelaku umkm. Faktor factor yang mendorong serta menghambat aktivitas umkm dengan adanya tatakelola yang diterapkan tersebut, peneliti tertarik untuk menemukan dampak tatakelola desa Wisata Nglanggeran bagi warga khususnya pelaku umkm. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam, memanfaatkan dokumen dan Focus grup discussion. Sebagai unit analisis adalah informan yang berasal dari pokdarwis, bumdes, pemerintah kalurahan dan lembaga masyarakat, serta pelaku UMKM yang berkaitan dengan aktivitas wisata. (2) Melakukan nalisis parsial, dan komprehensif (3) Menarik kesimpulan 4) Membuat rekomendasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tatakelola desa wisata Nglanggeran merupakan sinergi yang dijalin antara Bumdes dan Pokdarwis memiliki dampak positif terhadap UMKM setempat. Dampak tersebut dapat dibagi dua yakni secara langsung dan tidak langsung. Keberadaan homestay sebanyak 80 homestay dan tatakelolanya merupakan dampak lansung dari hasil Kerjasama Bumdes dan Pokdarwis. Adapun dampak yang tidak langsung yaitu adanya aktivitas UMKM bukan homestay terjadi akibat dari kehadiran wisatawan yang memilih menu paket wisata yang ditawarkan oleh masing masing institusi yaitu bumdes dan pokdarwis. Pokdarwis sebagai eksekutor masuknya wisatawan, maka wisatawan yang melalui informasi bumdes aktivitas kegiatannya tetap dikelola pokdarwis. Kemudian pokdarwis memandu wisatawan melakukan aktivitasnya sesuai pilihan menu paket wisata yang telah berjejaring dengan umkm seperti penyiapan makanan, di homestay, aktivitas kelompok umkm seperti industry olahan coklat, transportasi, snack /makan di kampung pitu atau sasaran destinasi wisata. Oleh karena kehadiran wisatawan fluktuatif, maka aktivitas umkm digunakan sebagai tambahan penghasilan bagi para pelakunya, sedangkan pekerjaan dibidang pertanian masih tetap dilakukan. Walaupun umkm sebagai tambahan penghasilan, menurutnya kadangkala hasilnya lebih besar dari penghasilan pokok sebagai petani. Kesimpulan, dampak tatakelola desa Wisata Nglanggeran terhadap pelaku umkm yaitu promosi, membuka kesempatan kerja, peningkatan pendapatan, peningkatan pengetahuan dan ketrampilan, jejaring dan Kerjasama. Namun keberadaan desa wisata belum dirasakan oleh semua pelaku umkm di Kalurahan Nglanggeran, karena letaknya yang dari pusat destinasi wisata sehingga tidak pernah dikunjungi wisatawan. Adanya masterplan pembangunan desa wisata diharapkan membuka peluang umkm yang belum tersentuh tatakelola desa wisata menjadi berkembang dan meningkat kesejahteraannya. Pemerataan perhatian pengelola desa wisata terhadap berbagai jenis umkm di Kalurahan Nglanggeran perlu dilakukan mengingat kedua Lembaga yakni Pokdarwis dan Bumdes diberikan amanah berfungsi sebagai pengungkit ekonomi desa, kesejahteraan warga dan PAD. Capaian penelitian berupa draft publikasi jurnal m jurnal Sinta 3/4 (3) Kata kunci : dampak, tatakelola, Desa wisata, UMKM, Nglanggeran

B.HASIL PENELITIAN

1.Kondisi geografis

Kalurahan Nglanggeran merupakan salah satu kalurahan termasuk wilayah Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul. Batas wilayah wilayah Kalurahan Nglanggeran, sebelah utara : Kalurahan Ngoro-oro, sebelah selatan : Kalurahan Putat, sebelah barat : Kalurahan Salam, sebelah Utara kalurahan Nglegi. Letak Kalurahan Nglanggeran dari Ibukota Kabupaten + 22 km, dan jarak dari Ibukota Propinsi sekitar + 23 km, jarak dari pusat pemerintahan kapanewon 5 km, Pusat pemerintahan Kalurahan Nglanggeran berada di Padukuhan Doga. Jarak tempuh dari Yogyakarta menuju Kalurahan Nglanggeran memerlukan waktu sekitar 1 jam, jarak tempuh dari pusat Kota Wonosari 16 km atau sekitar 30 menit..Kondisi jalan menuju kawasan wisata Nglangeran sudah memadai, sehingga dapat dikunjungi berbagai kendaraan seperti bus besar, mobil kecil dan sepeda motor

Kalurahan Nglanggeran termasuk daerah pegunungan Batur Agung dengan luas wilayahnya 762,80 ha. Elevasi di zona ini 200-800 mdpl, dengan kemiringan lereng rata-rata 200 – 350nm. Kondisi topografi Kawasan Nglanggeran cukup beragam, yakni terdiri dari dataran rendah, tinggi,

<https://desanglanggeran.gunungkidulkab.go.id/first/artikel/705>

2.kondisi penduduk

Tabel 1 .Jumlah Penduduk

Keterangan	Jumlah	Persen
Laki laiki	1350	49,76
Perempuan	1363	50,24
Jumlah	2713	100,00
KK		
Laki laki	746	85,85
Perempuan	123	14,15

Jumlah	869	100,00
--------	-----	--------

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan

No	Kelompok	Jumlah		Laki-laki		Perempuan	
		n	%	n	%	n	%
1	TAMAT SD / SEDERAJAT	697	25.70%	341	12.57%	356	13.13%
2	SLTP/SEDERAJAT	609	22.46%	333	12.28%	276	10.18%
3	TIDAK / BELUM SEKOLAH	561	20.69%	244	9.00%	317	11.69%
4	SLTA / SEDERAJAT	545	20.10%	293	10.80%	252	9.29%
5	BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT	217	8.00%	117	4.31%	100	3.69%
6	DIPLOMA IV/ STRATA I	44	1.62%	17	0.63%	27	1.00%
7	AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA	18	0.66%	7	0.26%	11	0.41%
8	DIPLOMA I / II	13	0.48%	3	0.11%	10	0.37%
9	STRATA II	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
10	STRATA III	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	TOTAL	2712	100%	1361	50.18%	1351	49.82%

Sumber : Profil desa, 2021

Kesejahteraan Keluarga

1. Jumlah keluarga prasejahtera 70 keluarga
2. Jumlah keluarga sejahtera 1 255 keluarga
3. Jumlah keluarga sejahtera 2 354 keluarga
4. Jumlah keluarga sejahtera 3 138 keluarga
5. Jumlah keluarga sejahtera 3 plus 24 keluarga
6. Total jumlah kepala keluarga 841 keluarga

MATA PENCAHARIAN MENURUT SEKTOR

1. Sektor Pertanian

Petani 697 orang dan Buruh Tani 20 orang

2. Sektor Perkebunan

Buruh perkebunan 15 orang dan Pemilik usaha Perkebunan 2 orang

3. Sektor Peternakan

Peternakan Perorangan 13 orang dan Buruh Usaha Peternakan 20 orang

4. Sektor Perikanan

Usaha Perikanan 30 orang dan Pemilik Usaha Perikanan 20 orang

5. Sektor Kehutanan

Pengumpul Hasil Hutan 14 orang dan Buruh Usaha Pengolahan Hasil Hutan 93 orang

Pemilik Usaha Pengolahan Hasil Hutan 14 orang

7. Sektor Industri Kecil & Kerajinan Rumah Tangga

8. Sektor Industri Menengah dan Besar

Karyawan perusahaan swasta 97 orang dan Karyawan perusahaan pemerintah 2 orang

9. Sektor Perdagangan

Buruh Perdagangan Hasil Bumi 118 orang dan Pengusaha Perdagangan Hasil Bumi 236 orang

10. Sektor Jasa Buruh

usaha jasa hiburan dan pariwisata 156 orang

Guru swasta 6 orang

Seniman/artis 6 orang

Wiraswasta lainnya 112 orang

3. Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat Jumlah

MCK Umum 10 unit

Jumlah Posyandu 6 unit

Jumlah kader Posyandu aktif 25 orang

Jumlah Dasawisma 69 Dasawisma

Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif 138 orang

4.Sarana Prasarana

Sarana Kesehatan yang tersedia berupa Puskesmas pembantu dan posyandu di setiap padukuhan. Sarana Pendidikan berupa 2 playgrup, TK 3 dan SD 3. Untuk Pendidikan lanjutan, masyarakat Nglanggeran melaksanakan di luar desa..Sarana beribadah berupa masjid 9 , mushola 9 dan gereja katolik 1. Sarana olah raga berupa 2 tempat lapangan sepakbola, voli 4 tempat dan lapangan bulutangkis 1 tempat.

4..Kelembagaan masyarakat berupa PKK, LPMD, Karang Taruna dan kelompok tani, pokdarwis, bumdes, posyandu dan lembaga keagamaan..

5.Kondisi Sosial Masyarakat Desa

Semangat Kegotongroyongan masyarakat Nglanggeran dapat diketahui dari aktivitas masyarakat seperti arisan yang berkelompok jumlahnya 49 kelompok . aktivitas Kesehatan misal menengok orang sakit, sambatan dalam pembangunan rumah, pengolahan lahan, pemeliharaan fasilitas umum, pemeliharaan ikan dan peternakan. Gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam menjaga ketertiban, ketentraman dan keamanan , kematian, bersih desa, membangun jalan/jembatan/saluran air/irigasi,, pemberantasan sarang nyamuk dan kesehatan lingkungan

6.Destinasi wisata

Desa Wisata Kalurahan Nglanggeran memiliki potensi wisata geopark gunung api purba. Adapun lokasi destinasi wisata yang utama terletak menyebar di 3 wilayah padukuhan yaitu Padukuhan Nglanggeran Kulon,Padukuhan Nglanggeran Wetan dan Padukuhan Gunungbotak sedangkan dua Padukuhan yakni Doga dan Padukuhan Karang Sari relative agak jauh dari kawasan wisata Nglanggeran, sehingga belum secara langsung menikmati hasil wisata Nglanggeran. Obyek wisata sebagai daya tarik wisata Nglanggeran berupa batu- batu yang berukuran besar hasil erupsi gunung berapi dan bukit Nglanggeran yang menarik bagi wisatawan

berupa hamparan hijau dari atas bukit terlihat sebuah panorama alam yang indah. Kemudian embung sebagai penampung air hujan yang bermanfaat untuk pengairan tanaman. Dan tersedia fasilitas penunjang bagi wisatawan berupa homestay, griya coklat, glamping di Gunung Kendang dan Spa. Disamping itu kuliner, dan transportasi untuk menuju ke obyek lain dalam kawasan wisata gunung api purba.

7. Tata Kelola Usaha Wisata di Kalurahan Nglanggeran

Hubungan pokdarwis dan Bumdes di Kalurahan Nglanggeran dalam mengelola usaha wisata dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerjasama No 09/BD-PK//I/2018 .Dari surat perjanjian Kerjasama tersebut berisi tentang hak dan kewajiban serta kewenangan masing masing pihak. Pihak kesatu adalah Bumdes Tunas Mandiri dan Pihak kedua adalah pengelola desa wisata yaitu Pokdarwis. Menurut informasi dari pemerintah desa Nglanggeran memang telah menyepakati bahwa dalam satu desa hanya ada satu pokdarwis yang mengelola wisata Desa Nglanggeran sesuai dengan surat perjanjian Kerjasama tersebut yang telah disetujui pihak pemerintah Kalurahan Nglanggeran bahwa Pokdarwis yang memperoleh kewenangan pengelola desa wisata.

Ditetapkannya Kalurahan Nglanggeran sebagai Desa wisata oleh Dinas Pariwisata DIY dan telah menerima beberapa penghargaan baik nasional maupun internasional menjadi kebanggaan masyarakat setempat sekaligus menjadi tantangan untuk tetap mempertahankan sebagai desa wisata berkelanjutan. Untuk itu , agar tidak terjadi konflik di masyarakat , maka pemerintah Kalurahan Nglanggeran bersama masyarakat setempat membuat kebijakan bahwa harus dilakukan penataan dalam mengelola desa wisata. Pokdarwis dan Bumdes yang sama sama mengelola potensi ekonomi desa keduanya harus berkembang sebagaimana porsinya masing masing. Berhubung pengelola wisata yang lebih awal adalah Pokdarwis dan Bumdes baru dibentuk terakhir maka Pokdarwis diberikan kewenangan mengelola desa wisata bekerjasama dengan Bumdes. Menurut Suharyanto dkk (2014) bahwa semua usaha yang sudah lama dikelola masyarakat, keberadaannya dan memberi kemanfaatan pada warga, diharapkan tetap melakukan usahanya secara optimal dan Bumdes tidak boleh menyelenggarakan kegiatan yang sama.

Usaha ekonomi desa memerlukan pengelolaan yang baik agar tidak terjadi ketimpangan dalam kegiatannya atau saling memperebutkan lahan usaha. Tahun 2017 dengan terbentuknya

kepengurusan Bumdes Tunas Mandiri yang baru, bumdes melakukan Kerjasama dengan Pokdarwis dalam sebuah surat perjanjian sebagai mitra kerja dengan syarat syarat yang ditentukan. Posisi mitra memiliki kedudukan yang sejajar antara Pokdarwis dan bumdes. Pada pasal 2 perjanjian Kerjasama tentang tata tertib yang diwajibkan melaksanakan pekerjaan masing masing dengan tanggungjawab. Mengambil tindakan bersama, koordinasi berkelanjutan, sopan santun kepada para pihak, masyarakat dan wisatawan, menjaga nama baik. Dari segi kewenangan, pokdarwis sebagai pengelola desa wisata diberikan kewenangan dalam penanganan kepariwisataan di Kalurahan Nglanggeran. Hal tersebut dapat diketahui dari surat perjanjian Kerjasama Bumdes Tunas Mandiri dengan Pokdarwis Nglanggeran pada Pasal 3 ketentuan No 2 tertulis penanganan kepariwisataan yang ada di Desa Nglanggeran yang sudah ada berjalan saat ini menjadi kewenangan Pengelola Desa Wisata. Berdasar ketentuan dalam surat perjanjian tersebut menunjukkan bahwa dalam tata kelola desa wisata Nglanggeran secara legalitas diberikan kepada Pokdarwis. Pokdarwis sebagai pengendali dan sekaligus sebagai operator aktivitas yang berkaitan dengan kepariwisataan desa. Sebagaimanan pernyataan bapak Senen mantan kepala desa Nglanggeran : *„Satu pintu itu untuk mengendalikan usaha wisata baik pokdarwis, bumdes dan pemdes dan kemudahan untuk memperhitungkan potensi ekonomi.pemasukan , dan distribusi penghasilan ke masyarakat, Hal tersebut dikuatkan pada pasal 2 tentang kewajiban pihak bumdes memberikan kewenangan dan keleluasaan Pokdarwis dalam mengembangkan wisata, pemasaran dan membuat produk. Dan membantu pokdarwis dalam mengembangkan konsep strategi pemasaran, finansial , menggandeng pihak ketiga dalam pengembangan pemasaran dan membuat produk . Menurut pak Senen “segala aktivitas pariwisata harus sepengetahuan desa dan pokddarwis, dengan tujuan agar lebih terkoordinasrm, tidak menimbulkan persaingan. Individu bisa memiliki inisiatif tetapi semua harus terkoordinai denga pokdarwis “.*

Adapun kewenangan Bumdes dalam pengelolaan desa wisata diberikan sebagai mitra dalam menjualkan paket wisata yang dibuat oleh Pokdarwis , menyediakan fasilitas bagi kegiatan wisata dan mendapatkan persen atau bagi hasil dari hasil usaha desa wisata. Namun dalam kewajibannya Bumdes salah satunya tertulis sebagai pihak yang memberikan perlindungan hukum dalam penetapan jasa Pelayanan di destinasi wisata yang dikelola Pokdarwis. Mengapa dalam menetapkan tarif destinasi wisata harus mendapat perlindungan

hukum ? Karena dalam memungut dana masyarakat harus ada payung hukumnya. Pokdarwis tidak memiliki payung hukum dalam menarik jasa pelayanan wisata, sehingga yang dilakukan sebelum ada perjanjian tersebut dapat dikatakan pungutan liar. Apabila melalui bumdes yang telah berbadan hukum maka jasa pelayanan wisata menjadi legal dan tidak menyalahi aturan.

Kedua Lembaga tersebut melakukan usaha ekonomi dalam hal ini desa wisata sehingga nilai manfaat yang diharapkan masyarakat memperoleh hasil usaha dari pokdarwis maupun Bumdesa. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tatakelola teori *Good Corporate Governance* didefinisikan sebagai seperangkat sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan (Efendi, 2009:2) dalam Chomariyah (2022). Hal ini karena *good corporate governance* dapat mendorong terbentuknya pola kerja manajemen yang baik. Mekanisme *Good Corporate Governance* merupakan suatu aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan kontrol dan pengawasan terhadap keputusan tersebut. Mekanisme corporate governance diarahkan untuk menjamin dan mengawasi berjalannya sistem *governance* dalam sebuah organisasi (Arifin, 2005). Selanjutnya menurut Prakarsa (2007:120) *Corporate Governance* adalah mekanisme administratif yang mengatur hubungan-hubungan antara manajemen perusahaan, komisaris, direksi, pemegang saham dan kelompok-kelompok kepentingan (stakeholders) yang lain Tujuan utama dari *Good Corporate Governance* adalah untuk menciptakan sistem pengendalian dan keseimbangan (check and balance) untuk mencegah penyalahgunaan dari sumber daya dan tetap mendorong terjadinya pertumbuhan perusahaan (Nur Ainy, Nurchahyo, A & B, 2013).

Dalam tata Kelola hubungan antar lembaga menurut Komite Kebijakan Governance terdapat 5 pilar yaitu transparan, akuntabilitas, pertanggungjawababan, pengelolaan secara professional dan keadilan atau kesetaraan. Bagaimana pelaksanaan tataKelola hubungan kedua lembaga yakni pokdarwis dengan bumdes diantaranya melakukan kordinasi melalui pertemuan rutin dan pertemuan lainnya, melakukan kerjasama , ada pertanggungjawaban pengelolaan, dan imbal jasa atas pengelolaan usaha. Dalam penerapan sebagaimana pilar tatakelola usaha desa wisata Nglanggeran sebagai berikut.

7.1. Transparansi

Tatakelola desa wisata yang transparan ditunjukkan diantaranya informasi yang diberikan kepada kedua belah pihak tentang wisatawan dan aktivitasnya diinformasikan dan dibuat dalam dokumen administrasi. Semua paket wisata sudah sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Niat tulus adalah kunci sukses dalam pengelolaan desa, dengan niat tulus dapat membuat pengelola tetap konsisten dengan apa yang sudah mereka yakini dan kerjakan diawal walaupun menghadapi kondisi dan kendala yang berbeda. Bagi peran, pengelola membagi peran sesuai dengan keahlian masing – masing agar kepariwisataan berjalan dengan baik. Transparan adalah bentuk mekanisme kerja dan pendanaan termasuk pendistribusian dana harus jujur dan terbuka agar masyarakat mengetahui, memahami, dan ikut memantau.

<https://lintar.untar.ac.id/repository/penelitian/bu>

7.2. Akuntabilitas

Menurut Mohammad Mahsun dalam Kamal (2022) , akuntabilitas memiliki definisi secara luas dan secara sempit. Secara luas, akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agen) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya, kepada pihak pemberi pertanggungjawaban tersebut. Dalam penelitian ini, Pokdarwis sebagai pemegang amanah pengelola desa wisata Nglanggeran mengadakan pertemuan rutin setiap malam selasa pahing dengan mengundang semua pemangku kepentingan. Hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Pengelola selalu mengadakan evaluasi bersama dengan masyarakat untuk membahas kembali kinerja pengelola dan masyarakat selama satu bulan dan saling bertukar pikir untuk menjadikan Desa Wisata Nglanggeran lebih baik kedepannya.

7.3. Pertanggungjawaban

Adanya pertemuan rutin yang dilakukan oleh pengelola desa wisata yang dihadiri oleh semua pihak yang berkepentingan, maka akan diketahui segala aktivitas pengelolaan wisata secara rutin/terus menerus perkembangannya. Laporan pengelolaan desa wisata menjadi dokumen pertanggungjawaban pengelola wisata. Isi pertanggungjawaban termasuk pengelolaan dananya. Tiap 35 hari (selapan) dan malam selasa kliwon. Pokdarwis mengundang semua unsur

dalam pengelolaan desa wisata yakni: pemerintah desa, BPKal, bumdes, kelompok UMKM, pengurus pokdarwis. Dalam forum tersebut pengelola desa wisata menyampaikan laporan kegiatan serta keuangannya. Dari pertemuan tersebut dilakukan diskusi serta evaluasi dan kegiatan yang direncanakan.

7.4. Profesional

Desa wisata Nglanngeran telah mendapatkan berbagai perhatian beberapa pihak, baik pemerintah melalui dinas pariwisata, pemda gunungkidul, dinas instansi pemerintah lainnya, pihak swasta, perguruan tinggi. Beberapa instansi tersebut telah memberikan dana bantuan berupa uang, pelatihan maupun pemikiran pengembangan desa wisata, maka pengelolaan yang professional akan memberikan dampak kepada konsumen dalam hal ini wisatawan baik dalam negeri maupun luar negeri, sehingga pengelolaan yang professional menjadi kewajiban pengelola Desa Wisata Nglanngeran. Melalui standart pelayanan wisata yang dijalankan akan memberikan dampak terhadap wisatawan maupun warga masyarakat yang terlibat dalam kegiatan wisata termasuk para pelaku UMKM.

7.5. Keadilan atau kesetaraan

Dalam tatakelola desa wisata Nglanngeran , telah adanya kesepakatan antara pokdarwis dan bumdes tentang peran pengelolaan dan hasil yang diterima masing masing institusi. Oleh karena pokdarwis memiliki sumberdaya manusia yang mampu mengelola wisata, maka diberikan peran operasional desa wisata. Bumdes kehadirannya lebih akhir namun memiliki cakupan kegiatan ekonomi desa yang lebih besar, dan telah memiliki badan hukum sehingga dapat memayungi aktivitas pokdarwis dalam menghasilkan keuangan desa wisata. Berdasarkan kesepakatan bahwa pembagian hasil dari kegiatan desa wisata sebanyak 10 persen diserahkan kepada bumdes, dan 90 persen kepada pokdarwis. Oleh Pokdarwis hasil yang diperoleh diberikan secara proporsional kepada beberapa pihak diantaranya kepada wilayah pedukuhan yang ada. Sedangkan dana yang masuk ke bumdes, sebagian diserahkan kepada Pemerintah kalurahan sebagai pemasukan PAD dan pengembangan bumdes.

Dalam pembagian hasil telah disepakati sebagai berikut : Adanya mekanisme pembagian keuntungan yang adil dan transparan. Pendapatan Desa Wisata Nglanngeran secara keseluruhan

berasal dari beberapa sumber yaitu tiket masuk dan tiket parkir, kontribusi pemilik homestay, dan pendapatan paket. Pendapatan ini tidak sepenuhnya digunakan untuk pengelolaan atau pengembangan desa, tetapi masih dibagi – bagi lagi untuk keperluan lainnya. Pendistribusian pendapatan Desa Wisata Nglanggeran merupakan hasil dari musyawarah masyarakat dan pengelola. Persentase pendistribusian pendapatan yaitu sebesar Rp.2000 ke Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Rp.500 untuk asuransi pengunjung ke Jasa Raharja, 10% ke BUMDes, 1% sewa tanah camping ground, 7% untuk pajak parkir Dinas Perhubungan, 25% untuk pemilik lahan parkir di Gunung Api Purba Nglanggeran, 8% untuk listrik dan biaya lainnya. Sedangkan setelah mendapatkan pendapatan bersih akan dibagi lagi, yaitu 80% untuk gaji pengelola dan 20% untuk kas. Kas juga dibagi lagi yaitu 35% kas pengembangan, 20% kas pengelolaan, 20% kas promosi, 10% kas kebudayaan, 6% kas 5 dusun, 4% kas sosial, dan 5% kas cadangan. Adapun informasi yang diperoleh bahwa keuntungan bersih dari pengelolaan desa wisata pada tahun 2022 sebanyak lebih dari 3 Milyar.

8.UMKM Di Kalurahan Nglanggeran

UMKM yaitu usaha kecil menengah merupakan penyebutan bagi usaha yang dilakukan masyarakat dengan karakteristik tertentu. Jumlah UMKM di Kalurahan Nglanggeran sebanyak 206 UMKM yang tersebar di 5 padukuhan. Dari jumlah tersebut sebanyak 49,51.% berlokasi di wilayah destinasi wisata Nglanggeran. Sebanyak 50,49 % terletak di dua padukuhan yang jauh dari destinasi wisata yaitu Padukuhan Doga dan Padukuhan Karang Sari. Adapun jenis usaha UMKM antara lain kuliner, jasa, industri olahan makanan. Pelaku UMKM secara individu dan berkelompok. Berdasar data desa bahwa jumlah UMKM tercatat sebanyak 206. Secara rinci jumlah UMKM menurut lokasi padukuhan sebagai berikut.

9. Dampak tatakelola Desa Wisata Nglanggeran terhadap Pelaku UMKM

Dari hasil penelitian diketahui bahwa, pengelolaan desa wisata Nglanggeran yang dikelola atas Kerjasama Bumdes dan pokdarwis dalam penyelenggaraan melibatkan masyarakat yang termasuk dalam usaha kecil dan menengah . Dengan keterlibatan umkm tersebut secara langsung memberikan dampak bagi pelaku UMKM tersebut. Menurut ketua Pokdarwis , Mursidi sebagai pengelola desa wisata , dampak pengelolaan wisata dapat dibagi dua yaitu dampak

langsung dan tidak langsung. Dampak langsung yaitu hasil kerjasama bumdes dan pokdarwis menghasilkan manfaat secara langsung bagi pelaku UMKM. Sedangkan dampak tidak langsung yaitu tatakelola desa wisata yang dilakukan atas Kerjasama Pokdarwis dengan Bumdes mempengaruhi pelaku UMKM melalui kegiatan yang dilaksanakan masing masing oleh Pokdarwis maupun dilakukan oleh Bumdes. Selain itu pelaku UMKM yang memperoleh manfaat langsung dari tatakelola desa wisata juga dapat mempengaruhi aktivitas umkm yang lainnya. sehingga pengaruhnya tidak langsung. Kerjasama Pokdarwis atau Bumdes memberikan manfaat bagi pelaku UMKM untuk memperoleh pendapatan maupun pengetahuan dari hasil usahanya.

9.1.Macam dampak Bagi Pelaku UMKM

Pelaku UMKM di Kalurahan Nglanggeran mengelola usaha dengan jenis usaha yang bervariasi. UMKM yang dijalankan ada yang langsung bersentuhan dengan dengan kegiatan wisata seperti homestay, kuliner dan souvenir, namun ada yang tidak langsung bersentuhan dengan kegiatan wisata. UMKM merupakan sector ekonomi yang mampu menggerakkan ekonomi nasional maupun local termasuk desa dan telah diakui oleh negara. Dalam tatakelola desa wisata, pengelola melibatkan masyarakat desa untuk mendukung pelayanan bagi wisatawan. Masyarakat yang terlibat di Desa wisata Nglanggeran tersebut merupakan masyarakat ekonomi menengah dan rendah . Pada umumnya masyarakat tersebut masih mengelola pertanian. Dengan tatakelola desa wisata saat ini menjadi peluang bagi masyarakat mengelola usaha yang diklasifikasikan sebagai UMKM Bagaimana tatakelola desa wisata mampu menggerakkan UMKM di Kalurahan Nglanggeran ini . bagaimana dampak ekonomi bagi pelaku UMKM, UMKM apa saja yang terdampak mengingat UMKM jenisnya bervariasi.

9.1.1.Bantuan Promosi Usaha

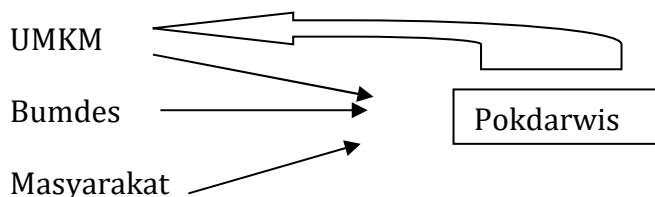
Dalam tatakelola desa wisata, adanya pilar professional dalam pelayanan kepada wisatawan, maka penerapannya pengelola melakukan promosi dengan membuat paket wisata yang dipublikasikan melalui media social dan melalui aplikasi digital. Dari pilihan paket wisata calon wisatawan dapat memilih dan menentukan jadwal kedatangan dan memilih paket wisata yang ditawarkan. Calon wisatawan dapat kontak langsung kepada pengelola atau para pemilik homestay maupun Bumdes. Dari kontak langsung tersebut, tetap harus diinformasikan kepada pengelola desa wisata untuk diadministrasikan.

Dalam surat perjanjian Kerjasama memang telah tertulis masing masing pihak wajib melakukan promosi desa wisata. Melalui Paket wisata yang dibuat Pokdarwis dan disepakati bumdes, maka masing masing memiliki tugas mempromosikan kepada calon wisatawan. Kehadiran wisatawan dengan memilih paket wisata yang ditawarkan, selanjutnya mekanismenya pengelola desa wisata akan memberitahukan kepada pelaku UMKM, dalam hal ini sebagai contoh adalah pemilik homestay agar menyiapkan segala sesuatu untuk menerima wisatawan menginap. Biaya yang ditentukan sebesar Rp 60.000 per orang per hari. Biaya makan sebesar Rp 25.000,- setiap kali makan.

Sebagaimana pernyataan Bu Prjiyem pemilik homestay : *pembayarannya itu langsung ke pokdarwis. makan itu tergantung dari pokdarwis harga sudah paketan, harga penginapan yang masuk ke saya itu Rp60.000 satu orang kalau dua orang yang 120.000 per malam Kemudian untuk makannya yang masuk ke saya itu 25.000 sekali makan. Kewajiban homestay menyediakan tempat tidur dengan Kasur, Kamar mandi. Makan itu tergantung permintaan jika permintaannya cuma tidur saja ya tidak dapat makan tetapi jika request-nya makanya nanti kita siapkan.*

Ibu Pajiyem adalah mantan TKW di Taiwan, yang saat ini mengusahakan homestay sambil membuka toko kebutuhan sehari hari. Dari pendapatan selama menjadi TKW mampu digunakan membangun rumah . Rumahnya telah memenuhi standar homestay yang disyaratkan untuk menerima tamu yang menginap berasal dari dalam dan luar negeri.

Adapun mekanisme hasil promosi yang dilakukan oleh beberapa pihak, selanjutnya diinformasikan ke pengelola , kemudian oleh pengelola memberikan order ke UMKM



Gambar 1 Mekanisme Hasil Promosi Dan Order Kegiatan

Menurut Bapak Subarno, dengan adanya kerjasama antara BUMDesa dan Pokdarwis sangat mempengaruhi kelangsungan usahanya. Menurutnya yang dapat dirasakan adalah dibantunya dalam usaha promosi yang dilakukan oleh pihak BUMDesa dan Pokdarwis sehingga

usaha beliau juga ikut berkembang. Tidak hanya itu, dengan adanya kerjasama tersebut usaha penginapan yang dijalankan juga mendapatkan bantuan perlengkapan seperti pengadaan toilet yang memadai mencakup shower, dan wastafel.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak tatakelola desa wisata Nglanggeran secara langsung dirasakan oleh pemilik homestay. Karena segala aturan dalam melayani wisatawan diatur oleh pengelola desa wisata. Hal tersebut merupakan hasil kesepakatan antara pemilik homestay dengan pengelola wisata bahwa usaha homestay dalam menerima tamu hanya melalui satu pintu. Sebelumnya pemilik homestay dalam penentuan harga dilakukan oleh masing-masing pemilik homestay tidak ada standart harga bagi wisatawan. Adapun jumlah homestay saat ini sebanyak 80 homestay di Nglanggeran namun hanya 50 % yang sering menerima tamu karena jarak homestay dengan pusat destinasi relative dekat. Pada umumnya tamu memilih yang paling dekat dengan pusat destinasi utama yaitu gunung api Purba di Padukuhan Gunungbotak, Nglanggeran Wetan dan Nglanggeran Kulon.

Hal tersebut sesuai pernyataan ketua Pokdarwis bahwa dampak tatakelola desa wisata yang dilakukan atas Kerjasama Pokdarwis dengan Bumdes dirasakan langsung oleh UMKM yang bergerak dibidang jasa homestay.

Selain homestay, masyarakat secara individu maupun secara kelompok yang mengelola usaha termasuk dalam paket wisata akan mendapat order tanpa mereka melakukan promosi juga menerima manfaat promosi paket wisata. Namun demikian biaya menikmati usahanya untuk UMKM non homestay harga ditentukan oleh UMKM sebagai contoh pembuatan tumpeng yang dimanfaatkan dalam acara budaya, wisata edukasi bercocok tanam, pemeliharaan ternak, dan budidaya coklat.

9.1.2. Kesempatan Kerja

Berdasar data Kalurahan Nglanggeran tercatat jumlah UMKM tahun 2022 sebanyak 206. Pada umumnya pengelolaan umkm dilakukan oleh anggota keluarga. Jumlah wisatawan yang tidak stabil, maka pelaku umkm memiliki strategi buka tutup dalam membuka kesempatan kerja. Apabila jumlah wisatawan cukup banyak melebihi kemampuan tenaganya, maka mereka akan memanfaatkan tetangga atau keluarga besarnya untuk membantu melakukan aktivitas usahanya. Adapun yang seringkali membuka kesempatan kerja yaitu usaha homestay, kuliner snack dan

makan. Selain homestay, dampak tidak langsung dari tatakelola desa wisata Nglanggeran terhadap kesempatan kerja adalah pada jasa lain seperti warung sembako, bengkel mobil dan motor, makanan olahan, laundry dan jasa lainnya

Memperhatikan data umkm dari Pemerinta Kalurahan Nglanggeran, apabila rata rata umkm melakukan usahanya dengan jumlah tenaga sebanyak 4 orang, maka jumlah pekerja akan terserap sebanyak 1044 orang. Bagi pengelola wisata , jumlah yang terlibat dalam pengelolaan wisata terserap sebanyak lebih dari 100 orang, mulai dari pengurus yang termasuk dalam struktur organisasi, juga diluar struktur seperti petugas parkir, dan pemandu wisata.

Peluang kerja di desa wisata ini dalam tatakelolanya menerapkan akuntabilitas dalam membagi peran kepada pengurus berdasarkan tugas dan fungsinya. Hal tersebut akan memberikan dampak terhadap UMKM yang masuk dalam lingkup kendali gina kelancaran usaha wisata. Sebagai contoh , bagi homestay apabila akan menanyakan tentang tamu maka mereka akan menanyakan kepada seksi penerima tamu. Kemudian apabila menanyakan keuangan akan bertanya kepada bagian keuangan atas biaya yang menjadi hak 2 nya.

Melalui usaha ekonomi yang dikembangkan masyarakat dampak yang dirasakan umkm dalam mendukung aktivitas desa wisata antara lain telah mampu menekan angka pengangguran desa dan mengurangi masyarakat bekerja keluar negeri sebagai TKW. Hal ini dikarenakan para umkm ini adalah mantan TKW luar negeri yang memutuskan tidak meneruskan menjadi TKW karena peluang kerja di desa terbuka dengan terkelolanya obyek wisata Nglanggeran.

9.1.3. Pendapatan

UMKM di Kalurahan Nglanggeran pada umumnya memiliki usaha tani. Usaha tani tetap dijalankan karena hasil usaha wisata tidak selalu stabil;. Jenis usaha tani yaitu usata tani pangan seperti padi, kacang dan singkong. Usaha ternak berupa kambing , sapi dan ayam. Walaupun usaha yang dilakukan dalam mendukung pariwisata memperoleh hasil pendapatan lebih besar dibanding dari usaha taninya , mereka tidak serta merta meninggalkan tetap melestarikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Nglanggeran tetap berpikir rasional. Pelaku UMKM di Nglanggeran, semangat untuk melakukan aktivitas ekonomi di sector pertanian dan sector non pertanian dalam kategori UMKM. Salah satu pemilik homestay Bapak Warsono menyatakan

setelah dilakukan perubahan tatakelola desa wisata tahun 2017 mulai terjadi peningkatan pendapatan usaha homestaynya.

Menurut bpk Warsono pemilik homestay : *adanya kerjasama pengelolaan wisata Nglanggeran tersebut usaha yang dijalankan bisa mengalami peningkatan dalam hal bidang ekonomi hingga sebesar 70 persen*

Bapak Warsono seorang mantan TKW di Arab Saudi yang bekerja selama 2 tahun menyusul istri yang lebih dahulu bekerja di Arab Saudi selama 6 tahun. Pelaku umkm ini memiliki pengalaman pahit dari kehidupan di desa sehingga harus meninggalkan desanya menjadi TKW di Arab Saudi, Taiwan dan negara Asean. Hasil menjadi TKW digunakan untuk membangun rumah yang saat ini digunakan untuk usaha homestay. Dari peningkatan pendapatan tersebut, dipergunakan untuk pengembangan usaha berupa pengadaan sarana usaha dan mengangsur pinjaman .

Selain dirasakan langsung oleh pemilik homestay , peningkatan pendapatan juga dialami umkm yang secara tidak langsung berhubungan dengan pengelola wisata yaitu pemilik toko sembako. Adanya permintaan barang kepada warung sembako di lingkungan desa akan memiliki peluang menambah variasi dagangannya. Sebelumnya hanya menyediakan kebutuhan masyarakat setempat yang terbatas, kondisi tersebut dapat petunjuk adanya tambahan pendapatan daripada sebelumnya.

Tanaman coklat yang terdapat di kalurahan Nglanggeran juga memiliki peluang usaha bagi UMKM setempat. Selain diolah buahnya, budidaya tanaman coklat masuk dalam paket wisata Nglanggeran. Memperoleh sumber pendapatan dari mengolah coklat dan dipasarkan hasilnya serta memberikan pelatihan bagi wisatawan dalam mengolah coklat menjadi sumber pendapatan bagi pelaku UMKM. Mereka melakukan secara berkelompok dan kebanyakan ibu-ibu.

9.1.4.Pendidikan

Desa wisata Nglanggeran telah dikenal oleh masyarakat Indonesia dan internasional. Untuk itu wisatawan dalam dan luar negeri jumlah yang berkenjung juga semakin bertambah. Untuk itu pengelola desa wisata memiliki tanggungjawab pelayanan terhadap para wisatawan sebaik mungkin. Untuk itu pilar akuntabilas diterapkan diantaranya memberikan edukasi bagi

UMKM yang termasuk dalam paket wisata yang ditawarkan kepada calon wisatawan . Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan diberikan kepada para pemilik homestay. Menurut ibu Warsini , beliau telah mendapat pelatihan sebanyak dua kali. Selain itu bagi pengolah coklat diberikan pelatihan pengolahan , pengemasan dan pemasarannya. Pelatihan tersebut terlaksana atas Kerjasama dengan BNI, dan melalui studi banding.

9.1.5 Jejaring

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan keberlanjutan usaha, pelaku umkm melakukan komunikasi yang berkelanjutan dengan wisatawan yang pernah berkunjung di usahanya. Khususnya umkm homestay , administrasi yang disediakan bagi tamu yaitu buku tamu yang kolomnya identitas dan no kontak serta kesan dan pesan. Pelaku UMKM homestay menjalin komunikasi dengan tamu yang telah kembali ke berbagai daerah dan negara, sehingga menjadi pelanggan untuk kemudia hari . Juga bagi umkm industri pengolah potensi local memperluas jaringan pemasaran dari produk olahan coklat.

9.2.Faktor Pendorong dan Penghambat Tatakelola Desa Wisata

9.2.1.Faktor Pendorong

Tatakelola yang dilakukan oleh Pokdarwis dan Kerjasama dengan Bumdes selalu dilakukan evaluasi dari instansi terkait serta dari internal pengelola. Penerapan prinsip tatakelola yang baik diantaranya Transparansi, akuntabilitas , kesetaraan dan keadilan serta tanggungjawab para pelakunya menghasilkan dampak positif kepada pelaku umkm khususnya homestay dan umkm dalam cakupan paket wisata untuk berkembang. dan meningkat kesejahteraannya.

8.2.2 Faktor Penghambat

Masih terbatasnya jangkauan perhatian pengelola desa wisata kepada jenis umkm selain homestay dan umkm yang termasuk paket wisata, menyebabkan kurang dirasakan manfaatnya keberadaan desa wisata. sehingga umkm kurang berkembang. Kemungkinan masih terbatasnya perhatian pengelola desa wisata disebabkan belum adanya kemampuan pengelola dalam membuat perencanaan program pengembangan menyeluruh di seluruh wilayah kalurahan Nglanggeran. Saat penelitian dilakukan , Ketua Bumdes dan ketua Pokdarwis memberikan informasi bahwa saat ini sedang dilakukan pendampingan oleh sebuah Perguruan Tinggi dalam

pembuatan masterplan desa Wisata Nglanggeran. Menurut Lurah adanya pembangunan terminal di wilayah pedukuhan Karang Sari, diharapkan seluruh wilayah akan memperoleh manfaat dari keberadaan desa wisata ini. Sebenarnya upaya menekan kesenjangan antara wilayah pedukuhan yang lokasinya di pusat kegiatan wisata dengan yang jauh dari destinasi wisata telah diperhatikan oleh warga padukuhan Karang Sari dan Padukuhan Doga dengan membuat rencana lokasi wisata di padukuhan setempat dan membahas dalam forum warga. Namun keterbatasan sumber daya dana dan manusia menjadi penghambat dalam realisasinya secara cepat.

Fasilitas pendanaan

Sampai saat ini UMKM secara mandiri menyediakan dananya baik melalui dananya sendiri, keluarga maupun pinjam bank. Pokdarwis maupun bumdes belum memberikan fasilitas pendanaan bagi UMKM. Namun desa memiliki Lembaga UED yang masih berjalan, sehingga kesempatan UED ada. Disamping itu Koperasi yang dirintis di Padukuhan Doga akan menjadi peluang alternatif sumber dana UMKM karena didampingin dari PT Jasindo.

Kesimpulan,

Tatakelola Desa Wisata Nglanggeran berdampak positif terhadap kondisi perekonomian pelaku UMKM khususnya homestay dan UMKM yang tercakup dalam paket wisata. Selain dampak ekonomi, tatakelola desa wisata secara sosial juga berdampak terhadap nilai kearifan lokal, pelestarian nilai-nilai kebudayaan lokal, dan juga konservasi lingkungan. Namun demikian masih ada kendala dalam pemerataan manfaat tatakelola desa wisata dalam penerapan, untuk itu agar lebih ditingkatkan di berbagai jenis UMKM sehingga dampak nilai kemanfaatan lebih luas dan merata di kalangan masyarakat khususnya pelaku UMKM di kalurahan Nglanggeran.

C. STATUS LUARAN

Luaran wajib berpa jurnal masih dalam proses penulisan. Yang rencana akan dikirim ke Jurnal Sosio Reflektif. Jurnal UIN Suka

D.KENDALA PELAKSANAAN PENELITIAN

Kesibukan peneliti mejadi kendala dalam menyamakan waktu melakukan penelitian lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amboningtyas ,Dheasey , Edward Gagah Purwa Taunay , dan Yunni Rusmawati DJ.2021. Kondisi Umkm Di Kota Semarang Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Pertumbuhan Ekonomi Krisis Serta Program Pemulihan Ekonomi. *Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian 2021*
- Afriza1a, Lia, Haryadi Darmawan, dan Anti Riyanti. 2020. Pengelolaan Desa Wisata Di Provinsi Jawa Barat *Jurnal Sains Terapan Pariwisata* Vol. 5 No. 3, pp. 306-315 @Poltek Sahid 2020,
- Aziz , King Abdul ; Dzunuwanus Ghulam Manar, dan Rina Martini, 2022. Tata Kelola Desa Wisata Berbasis Komunitas Di Desa Sendangdalem Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen,
- Denzin,Norman K dan Yvonna S.Lincoln, 2009. *Qualitative Research*.Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Dinar Wahyuni , 2020.Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran, Kabupaten Gunung Kidul
- Kamal. 2022. Pengertian Akuntabilitas: Aspek, Manfaat, Tingkatan, Dimensi, dan Mekanisme <https://www.gramedia.com/literasi/>
- Priasukmana Soetarso dan R. Mohamad Mulyadin, 2013, Pembangunan Desa Wisata [BBPLM Jakarta \(kemendes.go.id\)](http://BBPLM Jakarta (kemendes.go.id))
- Prihutami Rista , 2020. Komponen Kepariwisataa Dan Pengembangan Community Based Tourism Di Desa Wisata Nglanggeran . *jurnal Pariwisata*, Vol. 7 No. 1 April 2020 ISSN: 2355-6587, e-ISSN: 2528-2220
- Sandiasa, gede. 2019. Dampak Dalam Pengembangan Desa Wisata *Locus Majalah Ilmiah FISIP* Vol 11 No. 1 – Pebruari 2019
- Siska. Sudadio, Ika Rizqi Meilya, .2017. Dampak Program Pelatihan Las Listrik Dalam Meningkatkan Status Sosial Ekonomi Eks Narapidana Di Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. Vol. 2. No 1 Hlm. 1-115 Februari 2017
- Sucahyo ,Nurhadi , 2021. Desa Wisata Nglanggeran: Jalan Panjang Meraih Penghargaan UNWTO. <https://www.voaindonesia.com/a/desa-wisata-nglanggeran-jalan-panjang-meraih-penghargaan-unwto-/6346220.ht>

Suharno dan Ana Retnoningsih,2010. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: Widya Karya.

Teori Institusional (Institutional Theory). <https://perilakuorganisasi.com/teori-institusional-institutional-theory-2.htm>

Yani1 Ahmad, 2021. Tata Kelola Desa Wisata Di Desa Nangamiro Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu , "Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan dan Ekonomi" Vol. 4, No. 2
Juni 2021

Kesimpulan,

Tatakelola Desa Wisata Nglanggeran berdampak terhadap kondisi perekonomian pelaku umkm. Selain dampak ekonomi, tatakelola desa wisata secara social juga berdampak terhadap nilai 2 kearifan local. Pelestarian nilai 2, juga konservasi lingkungan.